

CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA: ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN DATA PANEL

(Achievements of Inclusive Economic Growth and Gender Inequality in Indonesia: Panel-Simultaneous Equation Analysis)

Sifa Rofatunnisa* dan Hardius Usman**

Politeknik Statistika STIS

Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta, 13330

*Email: sifarofatunnisa24@gmail.com dan **Email: hardius@stis.ac.id

Naskah diterima: 23 September 2021

Naskah direvisi: 22 November 2021

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2023

Abstrak

Indonesia masih menghadapi masalah laju penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama periode 2015-2019. Salah satu strategi yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan *Human Development Report*, Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan Indeks Ketimpangan Gender tertinggi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan terhadap pencapaian inklusivitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat pola simultanitas antara keempat indikator pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2015-2019. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah EC2SLS (*Error Component Two Stage Least Square*). Pola simultanitas yang terjadi memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum inklusif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki dan rata-rata upah perempuan signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan kesempatan kerja dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki signifikan menurunkan kemiskinan. Rasio angka partisipasi kasar perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMP signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi inklusif, ketimpangan gender, persamaan simultan, EC2SLS

Abstract

Indonesia is still facing the problem of reducing poverty and income inequality which did not show significant changes during 2015-2019. Achieving gender equality is one of the strategies that can help to achieve inclusive economic growth. Based on the *Human Development Report*, Indonesia is ranked 4th with the highest Gender Inequality Index in ASEAN countries. This study aims to analyze the impact of gender inequality in education and employment on achieving economic growth inclusiveness by analyzing the simultaneity pattern between four indicators of inclusive growth: economic growth, poverty rates, employment opportunities, and income inequality, in Indonesia during 2015-2019. The estimation method used in this study is EC2SLS. The pattern of simultaneity gives the conclusion that economic growth in Indonesia is not yet inclusive. The estimation results show that the ratio of the average years of schooling of female to male and the average of women's earnings significantly increases economic growth. The ratio of labor force participation rate significantly increases employment opportunities, the ratio of literacy rate significantly reduces poverty. The ratio of the gross participation rate at the tertiary level significantly reduces income inequality, the ratio of the net participation rate at the junior high school level significantly increases income inequality.

Keywords: inclusive economic growth, gender inequality, simultaneous equality, EC2SLS

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses multidimensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuannya, pembangunan harus dilakukan dengan bijak, yaitu dengan memperhatikan sifat inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, dirumuskan suatu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Agenda Pembangunan Global Tahun 2030 yang memuat 17 tujuan dan 169 target. Salah satu tujuannya, yaitu tujuan ke-8, adalah meningkatkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pertumbuhan di suatu negara dikatakan inklusif apabila pertumbuhan tersebut mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan pemerataan distribusi pendapatan (Dyah dkk., 2018).

Selama periode 2014 – 2019, ekonomi Indonesia tumbuh relatif stabil di angka 5 persen dengan rata-rata sebesar 5,06 persen. Pertumbuhan tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan sampai level 9,41 persen di tahun 2019. Selama periode 2014 – 2017, penurunan tingkat kemiskinan hanya sebesar 0,15 *percentage points* (pp) per tahun. Angka ini mengalami perlambatan jika dibandingkan periode 2010 – 2013 yang dapat mencapai

sebesar 0,49 pp per tahun. Pada tahun 2010 kemiskinan berada di level 13,33 persen dan dapat menurun sampai 11,37 persen di tahun 2013. Sama halnya dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan ketimpangan pendapatan yang digambarkan melalui koefisien gini. Penurunan koefisien gini tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Koefisien gini pada tahun 2015 berada di angka 0,408 dan menurun hanya mencapai angka 0,389 pada tahun 2019. Secara umum, kelompok 20 persen teratas selalu mendapatkan persentase tertinggi dalam hal distribusi pengeluaran per kapita dari tahun 2015 sampai dengan 2019 (Badan Pusat Statistik dalam Bappenas, 2019).

Untuk menangani masalah ketimpangan dan kemiskinan ini, diperlukan suatu strategi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas. Ramos et al. dalam Ramadhan & Setiadi (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif terdiri dari dua dimensi penting, yaitu *participation dimension* dan *benefit-sharing dimension*. *Participation dimension* berkaitan dengan bagaimana seluruh masyarakat berpartisipasi dalam proses pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja, sedangkan *benefit-sharing dimension* berkaitan dengan dampak dari partisipasi masyarakat tersebut dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Salah satu upaya yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender (Garcia et al. dalam Renie, 2020). Mewujudkan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak memperhitungkan dan mengatasi ketimpangan gender akan menjadikan efektivitas pembangunan tidak maksimal. Ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapatnya kesenjangan akses dan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Ketimpangan gender telah menjadi isu di sebagian besar negara baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk salah satunya di Indonesia.

Indeks Ketimpangan Gender mengukur ketimpangan yang terjadi pada aspek penting dalam pembangunan manusia, salah satunya adalah status ekonomi, yang dilihat dari partisipasi penduduk usia kerja pada pasar tenaga kerja. Salah satu tantangan terbesar bagi tercapainya kesetaraan gender adalah adanya jurang partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Menurut Suarez & Cameron (2020), di banyak negara, partisipasi perempuan di dunia kerja lebih rendah daripada laki-laki. Indonesia menjadi salah satu negara dengan partisipasi pekerja perempuan stagnan hanya di angka 50 persen selama 30 tahun terakhir, sedangkan partisipasi pekerja laki-laki dapat mencapai 80 persen. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa perempuan usia kerja banyak yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi.

Palaz dalam Usman & Lestari (2018) menyatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi disebabkan karena adanya perbedaan pendidikan. Jika kesetaraan gender dalam pendidikan tidak bisa terwujud maka partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi akan selalu dibatasi. Perbedaan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan sejalan dengan teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa perempuan memperoleh modal manusia yang lebih sedikit atau berbeda dari laki-laki. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki (Laili & Damayanti, 2018)

Assoumou-ella (2019) menemukan bahwa semakin tinggi kesetaraan gender pada pendidikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap (Produk Domestik Bruto) PDB per kapita. Bertay et al. dalam Lawanson & Umar (2019) juga menganalisis pengaruh ketimpangan gender pada pendidikan dan pekerjaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan gender pada kedua indikator tersebut dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan menurunnya pendapatan per kapita dan konsumsi per kapita akibat penurunan *output*. Schober & Winter-Ebmer (2011) juga membuktikan bahwa kesenjangan yang terjadi pada upah yang diberikan kepada pekerja perempuan dan laki-laki berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Beberapa hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Lawanson & Umar (2019) yang membuktikan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penelitian tentang pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia, namun, para peneliti tidak berfokus pada keinklusan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurut Wibowo (2019), pertumbuhan inklusif merupakan suatu fenomena yang memiliki hubungan saling ketergantungan antara satu indikator dengan indikator lainnya sehingga dibutuhkan suatu persamaan simultan dalam memodelkan pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain belum adanya referensi tentang pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, penelitian tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dengan metode simultan ini pun belum banyak dilakukan.

Melihat kondisi ketimpangan gender yang relatif masih tinggi di Indonesia selama periode 2015 – 2019 disertai masih terbatasnya referensi yang mengkaji pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif maka dengan menggunakan data panel, penelitian ini memiliki 3 poin tujuan terkait ketimpangan gender

dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. *Pertama*, menggambarkan secara umum 4 indikator utama pertumbuhan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan). *Kedua*, menggambarkan secara umum kondisi ketimpangan gender dalam pekerjaan dan pendidikan. *Ketiga*, menganalisis capaian inklusivitas pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap indikator utama pertumbuhan ekonomi inklusif dengan melihat pola simultanitas antara pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan.

Untuk mengkaji dampak ketimpangan gender terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pendekatan simultan, diperlukan teori terkait hubungan simultan antara indikator pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengaruh ketimpangan gender terhadap masing-masing indikator tersebut. Teori tersebut yang kemudian akan dijadikan sebagai kerangka pikir dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini menggunakan konsep pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh Ramos et al. (2013). Menurut Ramos et al. (2013), pertumbuhan ekonomi inklusif terdiri atas 4 komponen utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. *Kedua*, hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dijelaskan oleh hukum Okun yang menyatakan bahwa (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran (Mankiw, 2016). Implementasi teori tersebut dijelaskan dengan hasil penelitian dari Aliyu (2019) serta Indrajaya & Awandari (2016).

Ketiga, untuk menganalisis hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, penelitian ini menggunakan teori *poverty-growth-income-inequality (PGI) triangle* yang diperkenalkan oleh Bourguignon dalam Michálek & VÝbořtok (2018). *Keempat*, untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap masing-masing pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, yaitu Sitorus (2016), Vininda (2020), dan Bali moune-Lutz & McGillivray (2015) untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, penelitian Hong et al. (2019) untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender pada pendidikan terhadap kemiskinan. Penelitian Gonzales et al. (2015) dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap ketimpangan pendapatan, serta Bernatonyte et al. (2019) dan Borjas (2016) digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap kesempatan kerja.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 4 variabel endogen dan 9 variabel *predetermined*. Variabel endogen yang digunakan antara lain pertumbuhan PDRB, tingkat kemiskinan, pertumbuhan penduduk bekerja, dan ketimpangan pendapatan. Variabel *predetermined* yang digunakan terdiri atas variabel-variabel yang menggambarkan ketimpangan gender dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja, yaitu rasio Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan terhadap laki-laki, rasio Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM SMP) perempuan terhadap laki-laki, rasio Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas (APM SMA) perempuan terhadap laki-laki, rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) perempuan terhadap laki-laki, rasio Angka Melek Huruf (AMH) perempuan terhadap laki-laki, rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap laki-laki, pertumbuhan upah perempuan, pertumbuhan jumlah penduduk yang menganggur, dan interaksi antara *dummy* koefisien gini dengan pertumbuhan PDRB. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari *website* Badan Pusat Statistik, publikasi Potret Pendidikan Indonesia, dan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia dari tahun 2015 – 2019. Tabel 1 menampilkan definisi, bentuk, dan sumber dari semua variabel yang digunakan.

Tabel 1. Definsi dan Sumber Variabel yang Digunakan dalam Penelitian

Nama Variabel	Simbol	Bentuk	Definisi	Sumber
PDRB	lnPDRB	Logaritma Natural	Total <i>output</i> ekonomi di provinsi dan dinyatakan dalam satuan triliun rupiah. Data yang digunakan berupa data PDRB atas dasar harga konstan 2010.	Website Badan Pusat Statistik
Tingkat kemiskinan	MISKIN	Persentase	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Website Badan Pusat Statistik
Jumlah penduduk bekerja	lnBEKERJA	Logarita Natural	Jumlah penduduk yang bekerja dan telah memperoleh pekerjaan dan dinyakan dalam satuan ribu jiwa	Website Badan Pusat Statistik
Ketimpangan pendapatan	GR	Persentase	Koefisien gini yang didasarkan pada kurva lorenz	Website Badan Pusat Statistik
Rasio rata-rata lama sekolah	RRLS	Persentase	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.	Publikasi Potret Pendidikan Indonesia, BPS
Rasio Angka Partisipasi Murni SMP	RAPMSMP	Persentase	Perbandingan antara jumlah murid SMP sederajat usia 13 – 15 tahun dengan penduduk usia 13 – 15 tahun. Data rasio APM SMP perempuan terhadap laki-laki.	Publikasi Potret Pendidikan Indonesia, BPS
Rasio Angka Partisipasi Murni SMA	RAPMSMA	Persentase	Perbandingan antara jumlah murid SMA sederajat usia 16 – 18 tahun dengan penduduk usia 16 – 18 tahun. Data rasio APM SMA perempuan terhadap laki-laki.	Publikasi Potret Pendidikan Indonesia, BPS
Rasio Angka Melek Huruf	RAMH	Persentase	Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Data rasio AMH perempuan terhadap laki-laki	Publikasi Potret Pendidikan Indonesia, BPS
Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	RTPAK	Persentase	TPAK didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja. Data rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki.	Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, BPS
Pertumbuhan upah perempuan	lnUPAH	Logarita Natural	Imbalan setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya, baik berupa uang maupun barang, yang diterima buruh/karyawan perempuan selama sebulan.	Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah penduduk menganggur	lnUMP	Logaritma Natural	Banyaknya penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja	Website Badan Pusat Statistik
Interaksi Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Gini Ratio</i> (PEGR)	PEGR		Interaksi antara pertumbuhan PDRB dan <i>dummy</i> koefisien gini (1=ketimpangan sedang, 0=ketimpangan rendah).	Website Badan Pusat Statistik

Metode Analisis

Penelitian ini berisi kajian tentang capaian pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengaruh ketimpangan gender terhadap empat indikator utama pertumbuhan ekonomi inklusif yang dianalisis melalui hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut diamati selama kurun waktu 5 tahun pada periode 2015 sampai dengan 2019. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis model persamaan simultan data panel sebagai metode untuk melakukan analisis inferensia.

Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan meliputi spesifikasi model, uji simultanitas, identifikasi model, pemilihan model terbaik, uji asumsi, dan uji keberartian model. Berikut adalah spesifikasi model untuk masing-masing persamaan struktural dalam penelitian ini:

Persamaan struktural pertumbuhan ekonomi

$$\begin{aligned} \ln PDRB_{it} = & \alpha_1 + \beta_{11} \ln BEKERJA_{it} + \beta_{12} GR_{it} \\ & + \gamma_{11} RAMH_{it} + \gamma_{12} RRLS_{it} \\ & + \gamma_{13} \ln UPAH_{it} + u_{1it} \end{aligned} \quad (1)$$

Persamaan struktural kesempatan kerja

$$\begin{aligned} \ln BEKERJA_{it} = & \alpha_2 + \beta_{21} PE_{it} \\ & + \gamma_{21} RTPAK_{it} \\ & + \gamma_{22} RUPAH_{it} + \gamma_{23} RRLS_{it} \\ & + u_{2it} \end{aligned} \quad (2)$$

Persamaan struktural tingkat kemiskinan

$$\begin{aligned} MISKIN = & \alpha_3 + \beta_{31} PE_{it} + \gamma_{31} RAMH_{it} \\ & + \gamma_{32} PEGR_{it} + \gamma_{33} \ln UMP_{it} \\ & + u_{3it} \end{aligned} \quad (3)$$

Persamaan struktural ketimpangan pendapatan

$$\begin{aligned} GR_{it} = & \alpha_4 + \beta_{41} PE_{it} \\ & + \beta_{42} MISKIN_{it} \\ & + \gamma_{41} RAPKPT_{it} \\ & + \gamma_{42} RAPMSMA_{it} \\ & + \gamma_{43} RAPMSMA_{it} \\ & + \gamma_{44} RTPAK_{it} + u_{4it} \end{aligned} \quad (4)$$

Di mana :

- $\ln PDRB_{it}$: pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010
- GR_{it} : persentase koefisien gini
- $\ln BEKERJA_{it}$: logaritma natural jumlah penduduk bekerja
- $MISKIN_{it}$: persentase penduduk miskin
- $RTPAK_{it}$: rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki
- $RUPAH_{it}$: rasio upah perempuan terhadap laki-laki
- $RRLS_{it}$: rasio RLS perempuan terhadap laki-laki
- $RAMH_{it}$: rasio AMH perempuan terhadap laki-laki
- $RAPMSMP_{it}$: rasio APM SMP perempuan terhadap laki-laki
- $RAPMSMA_{it}$: rasio APM SMA perempuan terhadap laki-laki
- $RAPKPT_{it}$: rasio APK perguruan tinggi perempuan terhadap laki-laki
- $\ln UPAH_{it}$: logaritma natural rata-rata upah perempuan
- $\ln UMP_{it}$: logaritma natural jumlah penduduk yang menganggur
- $PEGR_{it}$: interaksi pertumbuhan ekonomi dengan *dummy gini ratio*
- u_{1it}, \dots, u_{4it} : komponen *error* persamaan struktural
- α : koefisien parameter konstanta
- β, γ : koefisien variabel endogen dan *predetermined*
- i : individu, meliputi 34 provinsi di Indonesia
- t : periode, berjumlah 5 tahun meliputi periode 2015 - 2019

Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi model dengan *order condition* dan *rank condition* untuk menentukan metode estimasi pada suatu persamaan struktural. Kemudian, dilakukan uji simultanitas untuk membuktikan secara empiris ada tidaknya masalah simultanitas antarpersamaan struktural dalam model. Uji simultanitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Hausman specification test*. Selanjutnya, dilakukan pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk memilih salah satu model pada persamaan simultan panel, yaitu antara model *fixed effect two stage least squares* (FE2SLS) dengan model *pooled two stages least squares* (Pooled 2SLS), sedangkan uji Hausman dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara *fixed effect two stage least square* (FE2SLS) dengan *error-component two stage least square* (EC2SLS).

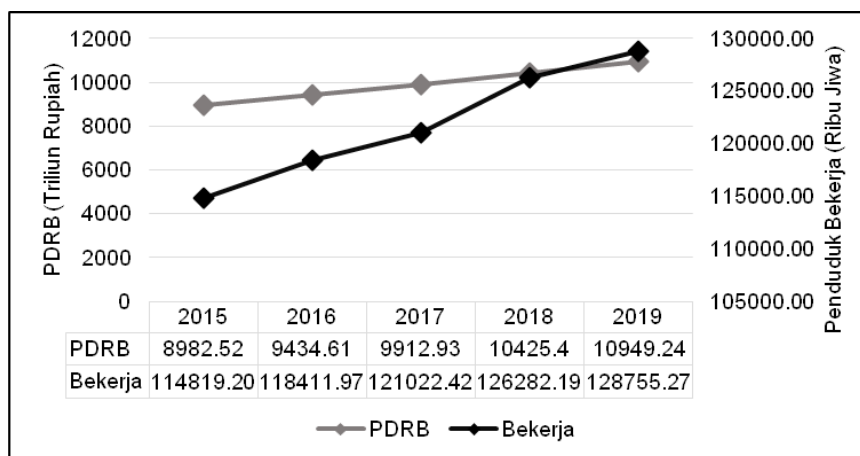
Setelah itu, dilakukan estimasi parameter dan uji asumsi, yaitu uji normalitas dan non-multikolinearitas, yang kemudian diikuti dengan uji keberartian model menggunakan uji simultan dengan uji F, uji parsial dengan uji t, dan koefisien determinasi. Dari hasil estimasi, dapat terlihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel *predetermined* terhadap variabel endogen pada masing-masing persamaan struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Tingkat Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan

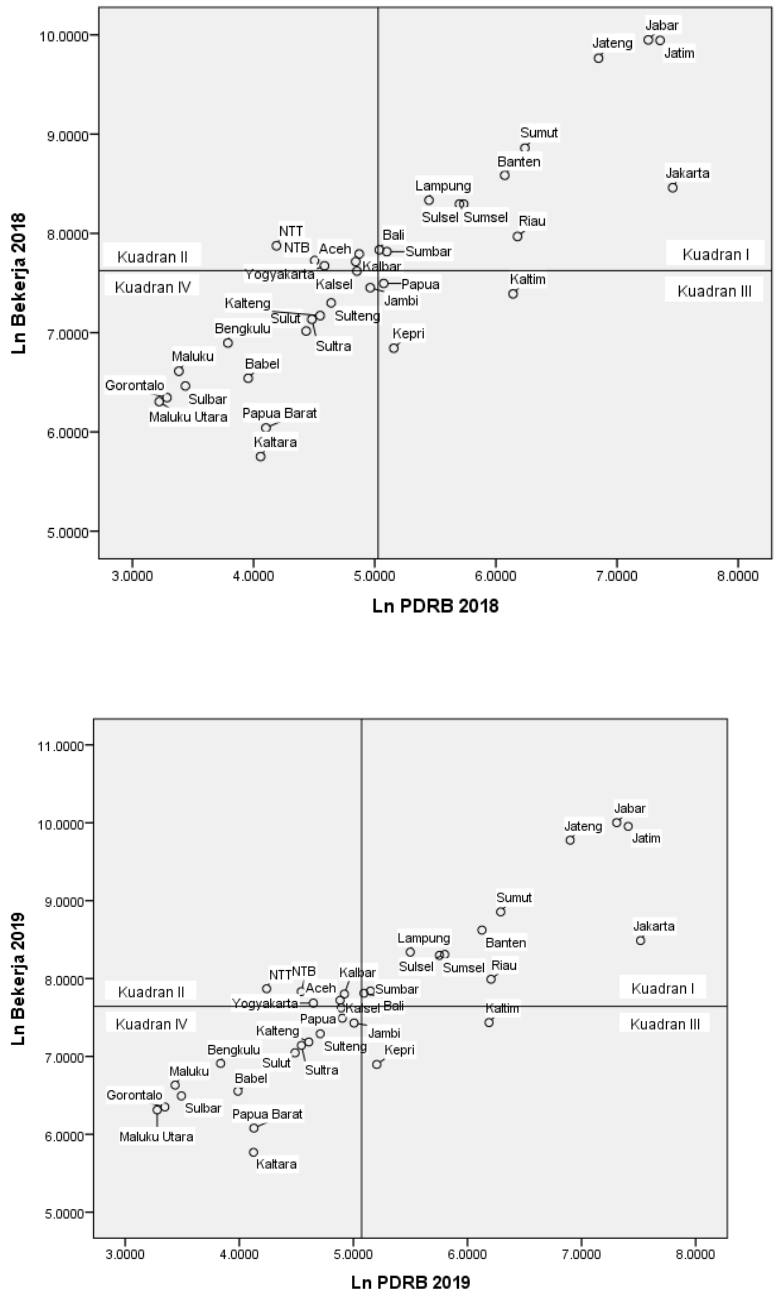
Secara nasional, PDRB mengalami kenaikan selama periode 2015 – 2019. Berdasarkan kenaikan tersebut, perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen. Terkait *participation dimension*, Ramos et al. (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi karena adanya partisipasi masyarakat melalui peningkatan jumlah penduduk bekerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1. Perkembangan PDRB dan Jumlah Penduduk Bekerja di Indonesia Tahun 2015 - 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja meningkat seiring dengan meningkatnya PDRB. Kondisi ini menggambarkan bahwa kedua indikator ekonomi tersebut memiliki hubungan yang bersifat positif. Hubungan antara keduanya dapat dilihat juga pada pemetaan provinsi menurut pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan penduduk bekerja pada Gambar 2.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

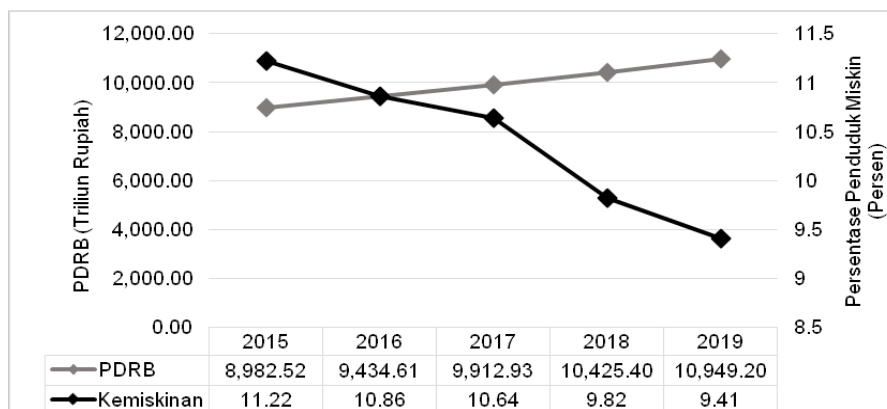
Gambar 2. Pemetaan Provinsi Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB dan Jumlah Penduduk Bekerja Tahun 2018 dan 2019

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat sebanyak 12 provinsi yang tersebar di Kawasan Barat Indonesia (perkecualian untuk Sulawesi Utara dan Bali) yang notabene-nya merupakan wilayah dengan perekonomian maju berada di kuadran I. Selanjutnya, sebanyak 5 provinsi berada di kuadran II, yang mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut rendah sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan PDRB di atas rata-rata nasional. Kemudian, 3 provinsi lainnya berada di kuadran III, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tidak bersifat *pro-job*. Sisanya, 13 provinsi (perkecualian untuk Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu) yang tersebar di Kawasan Timur Indonesia terletak di kuadran IV.

Di kuadran III terdapat Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kepulauan Riau yang selama tahun 2018 dan 2019 selalu memiliki pertumbuhan PDRB di atas rata-rata nasional, tetapi angka pertumbuhan penduduk bekerjanya di bawah rata-rata. Hal tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dapat memperluas kesempatan kerja. Artinya, pemerintah daerah setempat harus memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar.

Provinsi yang berada di kuadran IV pada tahun 2019 menjadi sebanyak 14 provinsi yang sebelumnya tahun 2018 sebanyak 13 provinsi. Penambahan 1 provinsi di kuadran tersebut terjadi karena adanya perpindahan Provinsi Papua dari kuadran III. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang bekerja di wilayah tersebut tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Terkait *benefit-sharing dimension*, Ramos et al. (2013) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Konsep ini disebut juga sebagai *pro-poor growth*. *Pro-poor growth* secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat kemiskinan menurun signifikan.

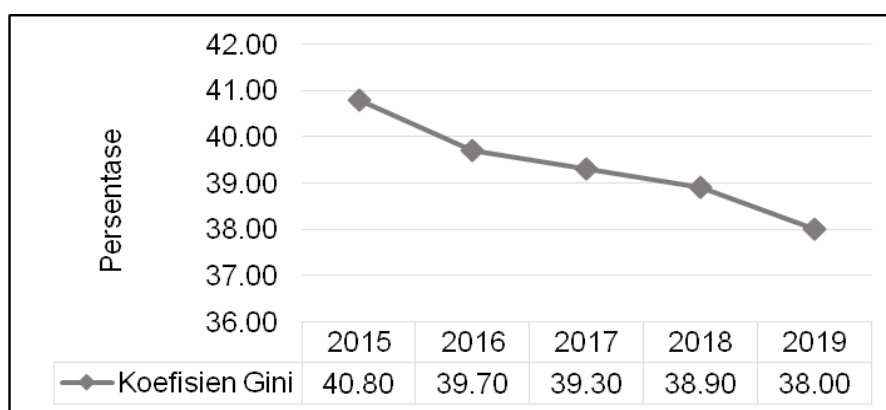


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 3. Perkembangan PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015 - 2019

Gambar 3 menunjukkan bahwa kemiskinan menurun cukup signifikan pada tahun 2018. Secara regional, rata-rata tingkat kemiskinan selama periode 2015 – 2019 di Maluku dan Papua sebesar 24,68 persen, kemudian Sulawesi sebesar 16,43 persen, Kalimantan sebesar 12,92 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 11,14 persen, Jawa sebesar 8,57 persen, dan Sumatera sebesar 6,08 persen. Struktur ini menunjukkan adanya ketimpangan di Indonesia antara wilayah barat yang relatif maju (terutama Jawa dan Sumatera) dan wilayah timur yang relatif tertinggal. Ketimpangan ini juga dapat dilihat dari peranan wilayah dalam pembentukan PDRB, di mana Jawa selalu memberikan kontribusi terbesar di atas 50 persen dan Sumatera di atas 20 persen (Tambunan, 2018).

Penurunan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kelompok penduduk miskin mendapatkan manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi walaupun secara wilayah manfaat yang diterima belum proporsional. Tambunan (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan memihak kepada kelompok penduduk miskin jika diikuti dengan pengurangan ketimpangan pendapatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

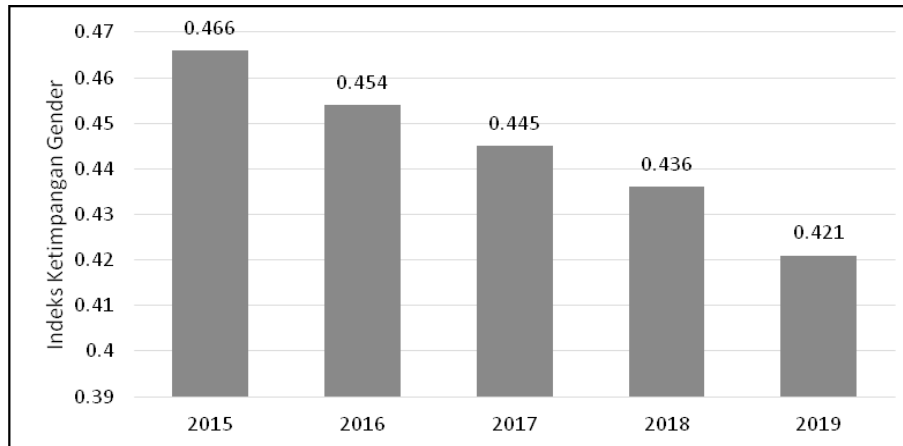
Gambar 4. Perkembangan Koefisien Gini Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019

Gambar 4 menunjukkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2015-2019 cenderung menurun. Pada tahun 2015, provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi adalah Papua Barat dengan koefisien gini sebesar 44 persen, sedangkan provinsi dengan ketimpangan terendah adalah Maluku Utara dengan koefisien gini sebesar 28 persen. Pada tahun 2016, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan ketimpangan tertinggi dengan koefisien gini sebesar 42,60 persen, sedangkan provinsi dengan ketimpangan terendah berada di Kepulauan Bangka Belitung dengan koefisien gini sebesar 27,50 persen. Selama 2017-2019, Kepulauan Bangka

Belitung berturut-turut menjadi provinsi dengan ketimpangan pendapatan terendah masing-masing sebesar 28,20 persen, 28,10 persen, dan 27 persen. Sementara itu, pada periode yang sama, Daerah Istimewa Yogyakarta berturut-turut menjadi provinsi dengan ketimpangan tertinggi dengan koefisien gini masing-masing sebesar 43,20 persen, 44,10 persen, dan 42 persen.

Gambaran Umum Ketimpangan Gender di Indonesia

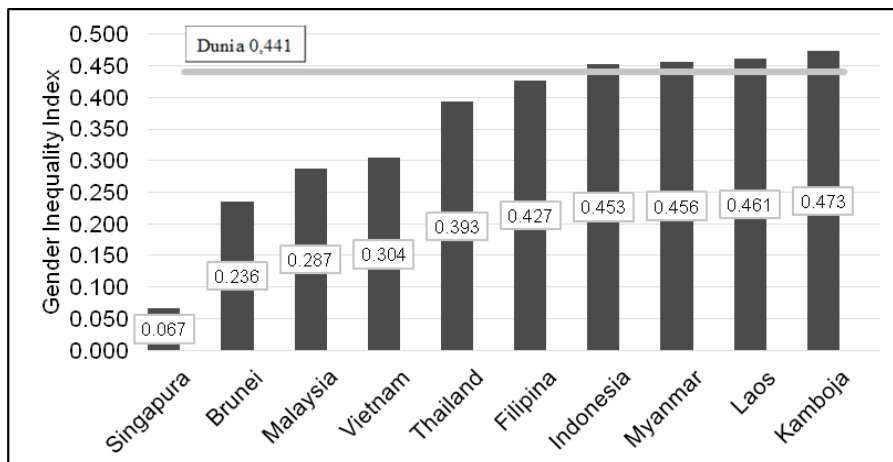
Selama periode 2015-2019, tingkat ketimpangan gender Indonesia terus mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesetaraan gender di Indonesia semakin membaik. Pada tahun 2015, indeks ketimpangan gender Indonesia tercatat sebesar 0,466 dan semakin mengecil hingga 0,421 di tahun 2019 (lebih detail lihat Gambar 5).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (data diolah)

Gambar 5. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia Tahun 2015-2019

Meskipun indeks ketimpangan gender ini mengalami penurunan, tetapi jika melihat ketimpangan gender negara-negara di ASEAN, posisi Indonesia termasuk masih tinggi dan masih di atas rata-rata dunia. Indonesia menempati posisi ke-7 di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina (Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kesetaraan gender di Indonesia masih belum optimal jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

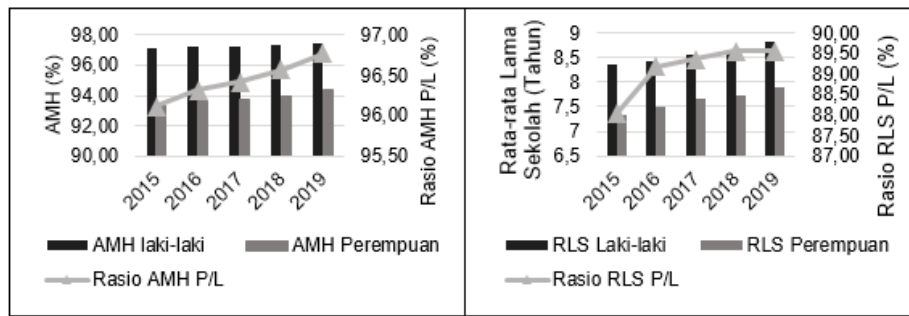


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah)

Gambar 6. Gender Inequality Index Negara-negara di ASEAN Tahun 2017

Gambaran Umum Ketimpangan Gender pada Pendidikan

Ketimpangan gender dalam pendidikan digambarkan dengan kondisi rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yang dibedakan menurut jenis kelamin (Gambar 7). Berdasarkan Gambar 7, RLS dan AMH perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki selama periode 2015 – 2019. Rata-rata RLS perempuan hanya sebesar 7,62 tahun, sedangkan laki-laki dapat mencapai 8,55 tahun. Untuk AMH, perempuan selalu memiliki nilai AMH yang lebih rendah dari laki-laki dengan rata-rata AMH perempuan adalah sebesar 93,80 persen, sementara laki-laki dapat mencapai AMH dengan rata-rata sebesar 97,27 persen. Namun, pada periode waktu tersebut terlihat bahwa baik rasio RLS maupun rasio AMH perempuan terhadap laki-laki mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam menempuh pendidikan semakin membaik.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

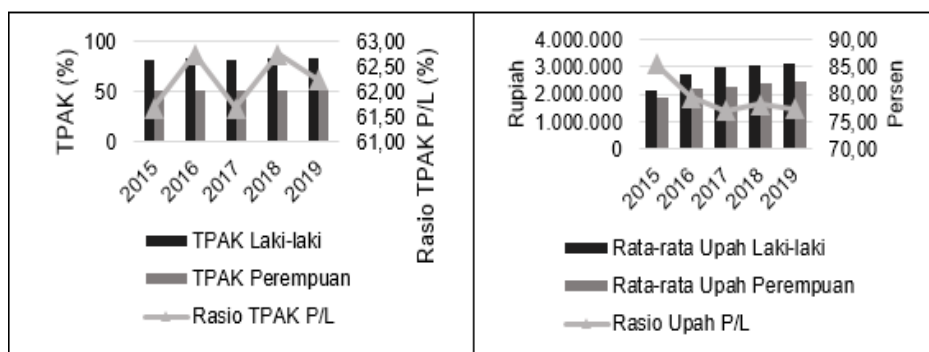
Gambar 7. Perkembangan rasio AMH dan RLS Perempuan terhadap Laki-laki di Indonesia, 2015 - 2019

Secara regional, provinsi dengan rata-rata rasio AMH perempuan terhadap laki-laki tertinggi selama periode 2015 – 2019 berada di Gorontalo, yaitu sebesar 100,11 persen. Sementara itu, provinsi dengan rata-rata rasio AMH perempuan terhadap laki-laki terendah berada di Papua, yaitu sebesar 86,49 persen. Angka rasio yang lebih besar dari 100 menunjukkan bahwa Gorontalo telah mencapai kesetaraan gender pada indikator angka melek huruf. Berbeda dengan Gorontalo, kesetaraan gender pada capaian pendidikan dalam hal kemampuan literasi di Papua masih belum tercapai karena masih adanya gap antara laki-laki dan perempuan sebesar 10,66 persen.

Sementara untuk rata-rata lama sekolah, provinsi dengan rata-rata rasio RLS perempuan terhadap laki-laki tertinggi selama periode 2015 – 2019 berada di Gorontalo yaitu sebesar 108,55 persen. Sementara itu, provinsi dengan rata-rata rasio RLS perempuan terhadap laki-laki terendah berada di Papua Barat, yaitu sebesar 69,52 persen. Gorontalo telah mencapai kesetaraan gender pada indikator rata-rata lama sekolah. Hal tersebut ditandai dengan angka rasio RLS yang lebih besar dari 100. Berbeda dengan Gorontalo, kesetaraan gender pada capaian pendidikan dalam hal akses ke pendidikan formal di Papua Barat masih belum tercapai karena masih adanya gap antara laki-laki dan perempuan sebesar 3 tahun.

Gambaran Umum Ketimpangan Gender dalam Pekerjaan

Kondisi ketimpangan gender dalam pekerjaan digambarkan dengan rasio TPAK dan upah yang diterima pekerja perempuan dan laki-laki selama periode 2015 – 2019 (Gambar 8). Selama periode tersebut, partisipasi angkatan kerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan rata-rata TPAK perempuan sebesar 51,47 persen sementara TPAK laki-laki dapat mencapai 82,73 persen, sedangkan rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2015 hingga 2019. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan kondisi kesetaraan gender di pasar tenaga kerja belum optimal. Sama halnya dengan TPAK, upah yang diterima laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan selama periode penelitian, dengan rata-rata upah yang diterima perempuan sebesar 2,24 juta rupiah, sementara upah yang diterima laki-laki dapat mencapai 2,83 juta rupiah. hal ini menggambarkan bahwa kesetaraan gender dalam upah belum tercapai. Kondisi ketimpangan gender dalam upah juga belum menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan persentase dari rasio upah perempuan terhadap laki-laki yang tampak mengalami penurunan dari tahun 2015 – 2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 8. Perkembangan rasio AMH dan RLS Perempuan terhadap Laki-laki di Indonesia Tahun 2015 - 2019

Secara regional, provinsi dengan rata-rata rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki tertinggi selama periode 2015 – 2019 berada di Papua, yaitu sebesar 79,94 persen. Sementara itu, provinsi dengan rata-rata rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki terendah berada di Jawa Barat, yaitu sebesar 52,83 persen. Gap TPAK antara perempuan dan laki-laki di Jawa Barat mencapai 39,08 persen, sedangkan di Papua gap yang terjadi hanya sebesar 17,22 persen.

Provinsi dengan rata-rata rasio upah perempuan terhadap laki-laki tertinggi selama periode 2015–2019 berada di Sulawesi Utara, yaitu sebesar 95,30 persen. Sementara itu, provinsi dengan rata-rata rasio upah perempuan terhadap laki-laki terendah berada di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 65,86 persen. Gap upah antara perempuan dan laki-laki di Kalimantan Timur mencapai 1,36 juta rupiah, sedangkan di Sulawesi Utara gap yang terjadi hanya sebesar 145,63 ribu rupiah.

Analisis Inferensia

Untuk menganalisis dampak ketimpangan gender terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif dilakukan pemodelan persamaan simultan yang terdiri atas 4 persamaan struktural. Tahap pertama dalam analisis model persamaan simultan adalah melakukan identifikasi persamaan struktural dengan *order condition* dan *rank condition*. Berdasarkan hasil identifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa keempat persamaan terdeteksi *overidentified*. Oleh karena itu, metode estimasi *two-stage least square* (2SLS) lebih efisien dibandingkan metode *Indirect Least Square* (ILS) dan *Ordinary Least Square* (OLS).

Tabel 2. Hasil Identifikasi dengan *Order Condition* dan *Rank Condition*

Persamaan	<i>Order Condition</i>	<i>Rank Condition</i>	Hasil Identifikasi
	$(K - k) \dots (m - 1)$	Rank (A) ... $(M - 1)$	
lnPDRB	$(10 - 3) > (2 - 1)$	Rank (A) = 4 - 1	<i>Overidentified</i>
lnBEKERJA	$(10 - 3) > (1 - 1)$	Rank (A) = 4 - 1	<i>Overidentified</i>
MISKIN	$(10 - 4) > (1 - 1)$	Rank (A) = 4 - 1	<i>Overidentified</i>
GR	$(10 - 4) > (2 - 1)$	Rank (A) = 4 - 1	<i>Overidentified</i>

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis (2021)

Langkah selanjutnya adalah menguji ada tidaknya masalah simultanitas menggunakan uji Hausman. Adapun hasil uji Hausman terangkum pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hausman Model Persamaan Simultan

Persamaan	F-statistik/ t-statistik	P-value	Kesimpulan
lnPDRB	67,40	0,00	Masalah simultanitas
lnBEKERJA	8,91	0,00	Masalah simultanitas
MISKIN	-4,64	0,00	Masalah simultanitas
GR	4,74	0,00	Masalah simultanitas

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis dengan Stata (2021)

Hasil uji simultanitas menunjukkan adanya masalah simultanitas pada keempat persamaan. Hal tersebut membuktikan metode OLS tidak lagi menghasilkan estimasi yang konsisten sehingga metode 2SLS dapat menjadi alternatif metode yang lebih konsisten dan efisien. Kemudian, dilakukan pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow untuk menentukan model terbaik antara *Pooled* 2SLS dengan FE2SLS dan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara FE2SLS dengan EC2SLS. Dari kedua uji tersebut, diperoleh hasil bahwa model terbaik untuk melakukan estimasi parameter adalah EC2SLS (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Hasil Pemilihan Model Terbaik

Persamaan	Uji Chow		Uji Hausman	
	P-value	Keputusan	P-value	Keputusan
lnPDRB	0,00	Tolak H_0	0,97	Gagal Tolak H_0
lnBEKERJA	0,00	Tolak H_0	1,00	Gagal Tolak H_0
MISKIN	0,00	Tolak H_0	0,07	Gagal Tolak H_0
GR	0,00	Tolak H_0	0,71	Gagal Tolak H_0

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis dengan Stata (2021)

Metode EC2SLS menggunakan estimasi *Generalized Least Square* (GLS) yang telah mengakomodasi asumsi homoskedastisitas dan nonautokorelasi sehingga asumsi yang harus dipenuhi hanya normalitas dan non-

multikolinearitas. Hasil pada Tabel 5 menunjukkan bahwa keempat persamaan telah memenuhi asumsi normalitas dan non-multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Persamaan	Uji Normalitas			Non-Multikolinearitas	
	χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(2)}$	P-value	Keputusan	Nilai VIF > 10
lnPDRB	4,66	5,99	0,10*	Gagal Tolak H_0	Tidak ada
lnBEKERJA	4,04	5,99	0,13*	Gagal Tolak H_0	Tidak ada
MISKIN	5,70	5,99	0,06*	Gagal Tolak H_0	Tidak ada
GR	2,16	5,99	0,34*	Gagal Tolak H_0	Tidak ada

*) tidak signifikan pada alfa = 0,05 atau 5 persen

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis dengan Stata (2021)

Adapun hasil estimasi model persamaan simultan dengan metode EC2SLS terangkum pada Tabel 6

Tabel 6. Hasil Estimasi Model EC2SLS pada Setiap Persamaan Struktural

Persamaan	Variabel Endogen	Variabel Pre-det	Koefisien	Ringkasan Statistik	
1	lnPDRB	Intersep	-4,4185*	R-Squared	0,7323
		lnBEKERJA	0,6968*	Prob (F-stat)	0,0000
		GR	-0,0220*		
		RAMH	0,0073**		
		RRLS	0,0205*		
2	lnKK	Intersep	4,6657*	R-Squared	0,7873
		lnPDRB	0,4871*	Prob (F-stat)	0,0000
		RTPAK	0,0063*		
		RUPAH	0,0005		
		RRLS	0,0008		
3	MISKIN	Intersep	37,1163*	R-Squared	0,5010
		lnPDRB	-4,3058*	Prob (F-stat)	0,0000
		RAMH	-0,1094*		
		PEGR	0,0696*		
		lnUMP	1,2669*		
4	GR	Intersep	24,0624*	R-Squared	0,2653
		lnPDRB	1,2946*	Prob (F-stat)	0,0000
		MISKIN	0,4342*		
		RAPKPT	-0,0200*		
		RAPMSMA	-0,0276**		
		RAPMSMP	0,0679*		

*) signifikan pada 5 persen; **) signifikan pada 10 persen

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis dengan Stata (2021)

Tabel 6 menunjukkan bahwa probabilitas dari uji F memiliki nilai yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 5 \text{ persen}$), sehingga terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa minimal terdapat satu variabel *predetermined* yang berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,7323 menunjukkan bahwa 73,23 persen variasi pada variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen yang terdapat pada model, sedangkan sisanya 26,77 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sementara itu, 78,73 persen variasi pada variabel kesempatan kerja dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk dalam model, sedangkan 21,27 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian, 50,10 persen

variasi yang ada pada variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel yang terbentuk di dalam model, sedangkan 49,9 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, 26,53 persen variasi pada variabel ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh kombinasi dari variabel yang terbentuk dalam model, sedangkan 73,47 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Model pada persamaan ketimpangan pendapatan menghasilkan nilai *r-square* paling rendah dengan signifikansi variabel *predetermined* paling banyak dibandingkan ketiga persamaan lainnya. Dalam penelitian sosial, *r-square* dengan nilai 9 persen masih dapat digunakan dalam pemodelan (Itaoka, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wallquist et al. (2010) dan Nolan (2006) di mana model pada penelitian mereka menghasilkan nilai *r-square* yang rendah dengan signifikansi variabel yang cukup banyak. Jika dilihat dari pola datanya, rendahnya nilai *r-square* tersebut disebabkan karena variasi dari data yang menyebabkan besarnya varians *error* dari model yang dihasilkan.

Pola Hubungan Simultan 4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hasil estimasi pada persamaan struktural 1 menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien sebesar 0,6968 pada variabel kesempatan kerja mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen pertumbuhan jumlah penduduk bekerja dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB sebesar 0,6968 persen. Temuan ini sejalan dengan hukum Okun yang menyatakan bahwa PDRB memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Aliyu (2019) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah memperluas kesempatan kerja, artinya ketika kesempatan kerja meningkat maka pengangguran akan menurun dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, nilai koefisien sebesar -0,0220 pada variabel ketimpangan pendapatan mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen koefisien gini dapat menurunkan pertumbuhan PDRB sebesar 2,2 persen. Temuan ini sejalan dengan teori *Poverty-Growth-Income Equality-Triangle* yang dikemukakan oleh Bourguignon. Kondisi ketimpangan pendapatan yang semakin lebar akan menyebabkan jumlah kelompok masyarakat berpendapatan rendah meningkat. Berdasarkan pendekatan ekonomi politik, mayoritas kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung memilih kebijakan yang bersifat redistribusi (pajak dan transfer) daripada kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan (Yumna et al., 2017).

Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja memiliki hubungan simultan yang searah. Hal ini dapat dilihat dari hasil estimasi persamaan struktural 1 yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga pada hasil estimasi persamaan struktural 2. Nilai koefisien sebesar 0,4871 pada variabel pertumbuhan ekonomi di persamaan 2 mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen pertumbuhan PDRB dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk bekerja sebesar 0,4871 persen. Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya & Awandari (2016) yang mengungkapkan bahwa perluasan kesempatan kerja secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan yang simultan dengan ketimpangan pendapatan. Namun, berbeda dari kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan simultan yang tidak searah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil estimasi persamaan struktural 1 yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga pada hasil estimasi persamaan struktural 4. Nilai koefisien sebesar 1,2946 mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen pertumbuhan PDRB dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0129. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wibowo (2019) dan Lestari et al. (2019) bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun, hal ini bertentangan dengan teori *Poverty-Growth-Income Equality-Triangle* yang dikemukakan oleh Bourguignon yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan simultan yang searah.

Hubungan simultan yang tidak searah antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum inklusif. Alasan yang mungkin membuat pertumbuhan ekonomi belum inklusif dikarenakan ekonomi Indonesia masih didorong oleh sektor-sektor yang bersifat padat modal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor perdagangan yang banyak digerakkan oleh sektor-sektor padat modal (0,63 persen), sektor konstruksi yang mulai mengarah menjadi sektor yang bersifat padat modal (0,56 persen), sektor pengolahan (0,86 persen), serta sektor informasi dan komunikasi (0,47 persen). Kenaikan ketimpangan pendapatan juga diduga disebabkan oleh turunnya *share* pertanian terhadap PDRB selama periode 2015 – 2019.

Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap 4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hasil estimasi persamaan (1) pada Tabel 6 menunjukkan bahwa ketimpangan gender pada pendidikan dan pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien sebesar 0,0205 pada variabel

RRLS mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen rasio RLS perempuan terhadap laki-laki dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,05 persen. Adapun nilai koefisien sebesar 0,0073 pada variabel RAMH mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen rasio AMH perempuan terhadap laki-laki dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB sebesar 0,73 persen. Dalam penelitian ini, kenaikan persentase rasio RLS dan rasio AMH perempuan terhadap laki-laki menunjukkan capaian dan hasil pendidikan yang semakin setara antara perempuan dan laki-laki. Hasil kajian dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Sitorus (2016). Menurut Todaro & Smith (2015), peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan mereka di tempat kerja, tetapi juga dapat memberikan eksternalitas positif bagi penurunan tingkat fertilitas, tingkat kematian anak, dan mendorong pendidikan serta kesehatan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pendidikan seorang ibu secara langsung dapat meningkatkan modal manusia anak-anaknya, yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, nilai koefisien sebesar 0,1587 pada variabel pertumbuhan upah perempuan menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen pertumbuhan upah perempuan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB sebesar 0,1587 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil kajian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Vininda (2020). Selama periode 2015 – 2019, perempuan selalu menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Peningkatan rata-rata upah perempuan diharapkan dapat memperbaiki kondisi kesetaraan gender dalam pasar kerja dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ketika upah meningkat maka perempuan akan memutuskan untuk memasuki pasar kerja karena upah reservasi mereka terpenuhi. Saat perempuan memutuskan untuk bekerja, alokasi potensi mereka akan tersalurkan dan membuat mereka menjadi lebih produktif. Ketika produktivitas pekerja perempuan meningkat maka produktivitas secara keseluruhan dapat meningkat juga. Kenaikan tingkat produktivitas inilah yang dapat menyebabkan proses produksi menjadi lebih efisien sehingga *output* yang dihasilkan akan lebih banyak dan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi persamaan 2 menunjukkan bahwa ketimpangan gender pada pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja. Nilai koefisien sebesar 0,0063 pada variabel RTPAK mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk bekerja sebesar 0,63 persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan memainkan peranan penting dalam peningkatan partisipasi angkatan kerja secara agregat. Semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja maka ekonomi akan tumbuh lebih cepat untuk menanggapi input tenaga kerja yang lebih tinggi. Bersamaan seiring berkembangnya negara, kendala sosial akan semakin melemah dan kesetaraan perempuan dalam tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas serta kemampuan perempuan. Kondisi inilah yang dapat memungkinkan perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan di luar rumah dan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja secara agregat (Verick, 2018).

Hasil estimasi persamaan 3 menunjukkan bahwa ketimpangan gender pada pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien sebesar 0,1094 pada variabel RAMH mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen rasio AMH perempuan terhadap laki-laki dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,1094 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hong et al. (2019). Peningkatan rasio AMH perempuan terhadap laki-laki menunjukkan adanya perbaikan ketimpangan gender dalam pendidikan menuju capaian pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan capaian pendidikan perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka melek huruf perempuan dapat meningkatkan kemampuan literasi mereka sebagai modal untuk mengembangkan potensi dan kualitas mereka sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak menjadi lebih besar. Ketika mereka memiliki peluang yang cukup besar untuk aktif dalam perekonomian dengan memperoleh pekerjaan yang lebih layak maka kesempatan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan taraf hidup yang lebih baik juga akan semakin besar. Ketika taraf hidup mereka semakin baik, perempuan dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan hal ini akan mendorong penurunan tingkat kemiskinan secara agregat.

Selain ketimpangan pendidikan, interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien sebesar 0,0696 pada variabel interaksi pertumbuhan ekonomi dengan *dummy* koefisien gini (PEGR) menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen pertumbuhan PDRB di wilayah ketimpangan sedang dapat meningkatkan persentase penduduk miskin sebesar 0,0696 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan akan berkurang di wilayah dengan kondisi ketimpangan sedang (persentase koefisien gini sebesar 40-50 persen). Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fosu (2009) di Afrika yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada wilayah dengan ketimpangan yang tinggi justru mengurangi elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan.

Hasil estimasi persamaan 4 menunjukkan bahwa ketimpangan gender pada pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien sebesar $-0,0200$ pada variabel RAPKPT mengindikasikan bahwa kenaikan 1 persen rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang perguruan tinggi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,02 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Selanjutnya, nilai koefisien sebesar $-0,0276$ pada variabel RAPMSMA mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen rasio APM perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMA dapat menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0276 persen. Dalam penelitian ini, kenaikan rasio APK perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi dan rasio APM perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMA menunjukkan partisipasi yang semakin setara antara laki-laki dengan perempuan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hasil kajian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Fonchamnyo & Fokong (2017). Partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan *return of education*, yaitu peningkatan upah akibat pendidikan yang diperoleh perempuan. Peningkatan tingkat kembalian (*return of education*) inilah yang kemudian dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Berbeda halnya dengan APK di jenjang perguruan tinggi dan APM di jenjang pendidikan SMA, peningkatan APM perempuan di jenjang pendidikan SMP dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil estimasi persamaan 4, diperoleh koefisien sebesar 0,0679 untuk variabel RAPMSMP. Hal ini mengindikasikan pada kondisi *ceteris paribus*, kenaikan 1 persen rasio APM perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMP dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0679 persen. Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Munir & Kanwal (2020). Selama periode 2015 – 2019, partisipasi perempuan dalam pendidikan sekolah menengah selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini telah mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya di mana perempuan memiliki akses yang rendah dalam pendidikan. Namun, perbaikan kesetaraan gender dalam pendidikan menengah tidak memberikan dampak positif terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Verick (2018) menyatakan pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan pekerjaan yang diambil oleh perempuan. Semakin tinggi pendidikan, upah reservasi akan semakin meningkat dan mengubah preferensi pencari kerja. Sebuah studi tentang pendidikan perempuan di Indonesia memperkirakan bahwa dibandingkan perempuan dengan tingkat pendidikan SMP, perempuan dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Seperti yang ditemukan dalam penelitian di beberapa negara berkembang, pendidikan perempuan harus lebih tinggi dari jenjang pendidikan SMP untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam angkatan kerja, terutama jika mereka ingin bekerja di pekerjaan yang lebih baik. Perempuan dengan lulusan tingkat pendidikan rendah (kurang dari SMA sederajat) berpotensi untuk bekerja di kegiatan subsisten dan sektor informal (Verick, 2018). Sektor informal identik dengan sektor yang memberikan upah yang murah maka adanya peningkatan rasio APM perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMP justru dapat memperparah kondisi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan angka koefisien gini.

KESIMPULAN

Pertama, secara umum pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum inklusif. Hal ini terlihat dari peningkatan PDRB diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja. Peningkatan kedua indikator tersebut sudah mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, namun penurunan kemiskinannya cenderung melambat. Selain itu, secara regional tingkat kemiskinan juga cenderung tinggi di wilayah timur yang relatif tertinggal, sedangkan di wilayah barat yang relatif maju tingkat kemiskinannya cenderung rendah. Struktur ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima dari pertumbuhan ekonomi belum merata. Ketimpangan ini juga dapat dilihat dari peranan wilayah dalam pembentukan PDRB, di mana wilayah barat (Jawa dan Sumatera) selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Indonesia.

Kedua, ketimpangan gender di Indonesia selama periode 2015 - 2019 cenderung mengalami penurunan. Namun, jika melihat ketimpangan gender negara-negara di ASEAN, posisi Indonesia termasuk masih tinggi dan masih di atas rata-rata dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kesetaraan gender di Indonesia masih belum optimal, namun terus mengalami perbaikan. Ketimpangan gender di bidang pendidikan yang digambarkan rasio angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, namun masih di bawah 100 persen hal ini mengindikasikan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki masih belum tercapai, namun terus mengalami perbaikan. Pada bidang ketenagakerjaan, perbaikan ketimpangan gender dalam mengakses pasar kerja yang digambarkan oleh rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki masih belum optimal. Sementara untuk kondisi pasar kerja, rasio upah perempuan terhadap laki-laki cenderung mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender pada upah semakin memburuk.

Ketiga, pola simultanitas yang terjadi memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum inklusif. Pertumbuhan ekonomi baru mampu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja, namun belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. *Keempat*, ketimpangan gender pada pendidikan dan pekerjaan yang diproksi dengan rasio RLS, rasio TPAK, rasio AMH, rasio APK di perguruan tinggi, rasio APM di jenjang pendidikan SMP (perempuan terhadap laki-laki), dan rata-rata upah perempuan signifikan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diberikan. *Pertama*, untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, pemerintah perlu mempertahankan pertumbuhan yang positif dengan memperluas lapangan kerja produktif, terutama di provinsi yang pertumbuhannya teridentifikasi tidak bersifat *pro-job* dan melakukan evaluasi serta mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang bersifat *pro-poor*. *Kedua*, capaian kesetaraan gender di bidang pendidikan sebaiknya dapat terus ditingkatkan, pemerintah diharapkan untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua jenjang pendidikan, mengoptimalkan pengurangan angka putus sekolah khususnya bagi perempuan, serta meningkatkan penyediaan layanan pendidikan baca tulis.

Ketiga, untuk memperbaiki ketimpangan gender di bidang ketenagakerjaan diharapkan pemerintah maupun perusahaan memberikan akses kepada perempuan ke berbagai jenis pekerjaan dan industri dengan memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen, mempromosikan kewirausahaan perempuan, menghapus diskriminasi upah dengan melakukan deteksi terhadap kriteria pengupahan yang ditetapkan perusahaan, dan melakukan penindakan secara tegas bagi perusahaan yang melanggar peraturan tentang pengupahan. *Keempat*, kegagalan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan menyebabkan tidak terwujudnya pertumbuhan inklusif di Indonesia sehingga perlu adanya perbaikan di bidang pendidikan dengan meningkatkan partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya untuk terus meningkatkan partisipasi penduduk perempuan.

Analisis terkait ketimpangan gender terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif ini dapat berguna sebagai kunci utama untuk memulai integrasi konsep pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan memahami permasalahan gender, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan pengarusutamaan gender yang salah satu strateginya adalah menempatkan *gender budgeting* sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan penggunaan APBN yang mensejahterakan rakyat dan berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Borjas, George J. (2016). *Labor economics (7th ed)*. New York: McGraw-Hill Education.
- Mankiw, N Gregory. (2016). *Macroeconomics (9th ed)*. New York: Worth Publishers.
- Tambunan, Tulus. T.H. (2018). *Perekonomian Indonesia 1965-2018*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2015). *Economic development (12th ed)*. New Jersey: Pearson.

Jurnal dan Working Paper

- Aliyu, U.L. (2019). Impact of employment on economic growth and development. *International Journal of Economics & Business*, 5(2), 102–109.
- Assoumou-ella, G. (2019). Gender inequality in education and per capita GDP: The case of CEMAC countries. *Economics Bulletin*, 39(2), 1154–1162. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3391773>
- Bali moune-Lutz, M. & McGillivray, M. (2015). The impact of gender inequality in education on income in Africa and the Middle East. *Economic Modelling*, 47, 1–11.
- Bernatonyte, D., Ciburiene, J., Simanaviciene, Z., & Startiene, G. (2019). The impact of higher education on employment in the labour market: Lithuanian case. *Contemporary Educational Researches Journal*, 9(1), 56–64.

- Dyah Hapsari, S.A., Hutagaol, M.P., & Asmara, A. (2018). Pertumbuhan Inklusif : Fenomena pertumbuhan inklusif di kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85-112
- Fonchamnyo, D.C., & Fokong, N.H. (2017). Educational gender gap, economic growth and income distribution: An empirical study of the interrelationship in Cameroon. *International Journal of Economics and Finance*, 9(3), 168. <https://doi.org/10.5539/ijef.v9n3p168>
- Fosu, A.K. (2009). Inequality and the impact of growth on poverty: Comparative evidence for sub-Saharan Africa. *Journal of Development Studies*, 45(5), 726–745. <https://doi.org/10.1080/00220380802663633>
- Gonzales, C., Jain-Chandra, S., Kochhar, K., Newiak, M., & Zeinullayev, T. (2015). Catalyst for Change: Empowering Women and tackling income inequality. *Staff Discussion Notes*, 15(20), 1.
- Hong, G., Kim, S., Park, G., & Sim, S.G. (2019). Female education externality and inclusive growth. *Sustainability (Switzerland)*, 11(12), 1–12.
- Indrajaya, I.G.B., & Awandari, L.P.P. (2016). Pengaruh Infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja. *E-Jurnal EP Unud*, 5(12), 1435–1462.
- Itaoka, K. (2012). Regression and interpretation low R-squared. In *Proceedings of the presentation at Social Research Network 3rd Meeting, Noosa*. Mizuho Information and Research Institute, Inc.
- Laili, M.H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan upah antargender di Indonesia: Bukti empiris di sektor manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 1–21.
- Lawanson, O.I. & Umar, D.I. (2019). Gender inequality and its implication for inclusive growth in Nigeria from 1980 to 2018. *Asian Economic and Financial Review*, 9(7), 789–806.
- Lestari, D., Rahmi, D., & Julia, A. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat pada tahun 2000-2018. *Prosiding Ilmu Ekonomi UNISBA*, 5(1), 68–74.
- Michálek, A. & Výboštok, J. (2018). Economic growth, inequalities and poverty in Slovakia from 2005 to 2015 (The analysis of relations and contexts at a regional level). *European Spatial Research and Policy*, 25(1), 55–74.
- Munir, K. & Kanwal, A. (2020). Impact of educational and gender inequality on income and income inequality in South Asian countries. *International Journal of Social Economics*, 47(8), 1043–1062.
- Ramadhan, R.R. & Setiadi, Y. (2019). Pengaruh modal fisik dan sumber daya manusia terhadap indeks inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 109–124.
- Ramos, R.A., Lammens, J.W., & Ranieri, R. (2013). Mapping inclusive growth. *International Policy Centre for Inclusive Growth Working Paper*, No. 105.
- Renie, E. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Inklusif. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 10-17.
- Schober, T. & Winter-Ebmer, R. (2011). Gender wage inequality and economic growth: Is there really a puzzle?-A comment. *World Development*, 39(8), 1476–1484.
- Sitorus, A.V.Y. (2016). Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (The impact of gender inequality in economic growth in Indonesia). *Sosio Informa*, 2(1), 89–101.
- Usman, H., & Lestari, F.C. (2018). Gender equality and economic development. *KnE Social Sciences*, 3(10), 230. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2914>
- Verick, S. (2018). Female labor force participation and development. *IZA World of Labor*, Issues 87.
- Wallquist, L., Visschers, V.H., & Siegrist, M. (2010). Impact of knowledge and misconceptions on benefit and risk perception of CCS. *Environmental Science Technology*, 44(17), 6557-6562.

Yumna, A., Rakhmadi, M.F., Hidayat, M.F., Gultom, S.E., & Suryahadi, A. (2017). Mengestimasi dampak ketimpangan terhadap pertumbuhan dan pengangguran di Indonesia. *SMERU working paper*.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Nolan, J.A. (2006). Religious participation effects on mental dan physical health. *Disertasi*. Cornell University, New York.

Vininda, S. (2020). Pengaruh kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau periode 2011-2015. *Skripsi*, Politeknik Statistika STIS, Jakarta.

Wibowo, B. (2019). Dampak spillover dan kebijakan fiskal terhadap pencapaian pertumbuhan inklusif antarprovinsi di Indonesia. *Tesis*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Referensi Lain

Badan Pusat Statistik. (2019). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III - 2019.

Bappenas. (2019). Public hearing indeks pembangunan ekonomi inklusif sebagai indikator kualitas pembangunan nasional dan daerah. Jakarta: indeks pembangunan ekonomi inklusif, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

BPS. (2019). Berita resmi statistik: Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2019. Jakarta: Badan Pusat Statitsik.

Suarez, D.C., & Cameron, L. (10 Maret 2020). Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menambah jumlah pekerja perempuan. Diperoleh tanggal 28 Juli 2021, dari <https://theconversation.com/mengapa-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tidak-menambah-jumlah-pekerja-perempuan-133247>.